



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADI MAULANA
2. Jabatan : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 155080

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.389.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/48 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 650 m2/294 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah Seluas 631 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 15.630 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000
5. Tanah Seluas 20.220 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 19.070 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000
7. Tanah Seluas 19.690 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000
8. Tanah Seluas 20.790 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 553.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000



2. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 95.000.000
3. MOBIL, TOYOTA HARRIER 2.0 STD A/T Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 430.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 888.272.762

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.260.772.762

III. HUTANG Rp. 176.514.800

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.084.257.962

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.